

Imunisasi Rutin pada Anak Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia: Persepsi Orang tua dan Pengasuh





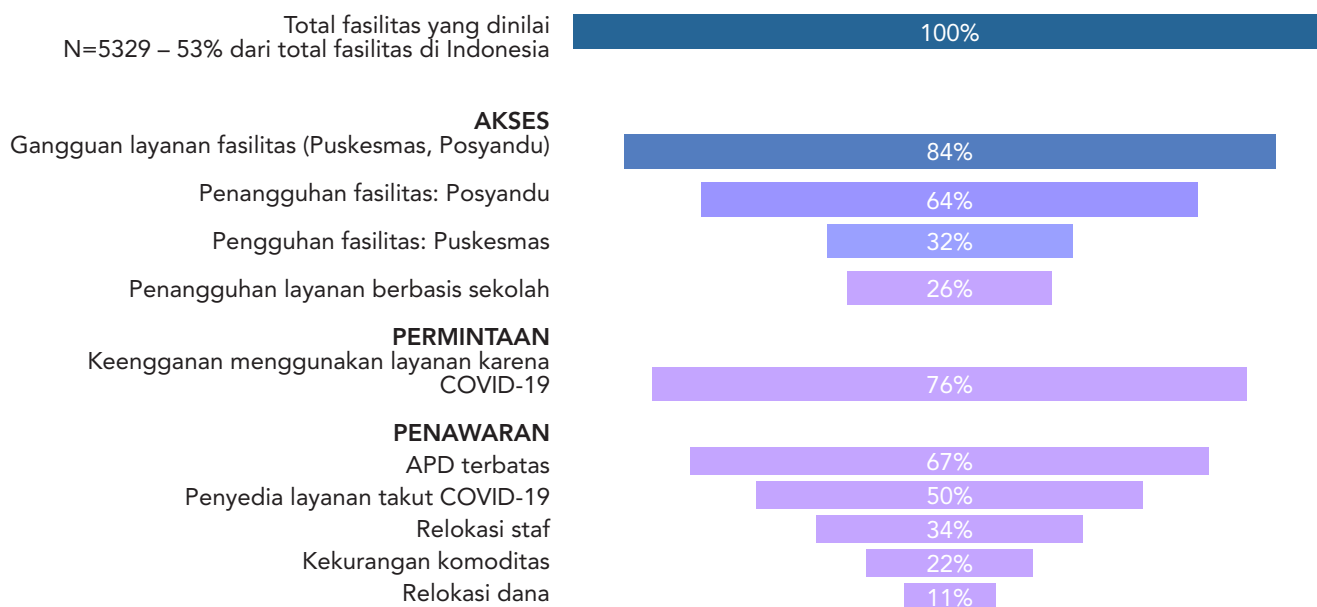
Sudarmini (28) dan Putri, anak perempuannya (11 bulan)
dari Desa Sidorejo, Jawa Tengah, Indonesia.

© UNICEF/2020/Fauzan

Latar Belakang

Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada bulan Maret 2020, cakupan imunisasi rutin untuk mencegah penyakit-penyakit pada anak-anak seperti campak, rubella, dan difteri semakin menurun. Misalnya, angka cakupan imunisasi difteri, pertusis dan tetanus (DPT3) dan campak dan rubella (MR1) berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020 dibandingkan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya.¹

Untuk lebih memahami efek pandemi COVID-19 terhadap imunisasi, Kementerian Kesehatan dan UNICEF melakukan penilaian cepat pada April 2020: hasilnya menunjukkan bahwa 84% dari semua fasilitas kesehatan (faskes) melaporkan layanan imunisasi terganggu di kedua level yaitu Puskesmas dan Posyandu.² Gangguan dalam layanan imunisasi sangat besar dan langsung dirasakan, dengan beberapa hambatan yang diamati di berbagai tingkatan (Gambar 1). Hambatan akses akibat penghentian layanan disertai dengan menurunnya permintaan disebabkan masyarakat takut tertular COVID-19. Dari survei tersebut ditemukan kendala pasokan akibat petugas pengelola program imunisasi dan sumber daya imunisasi dialihkan ke penanganan COVID-19, terbatasnya alat pelindung diri untuk imunisasi yang aman, dan kekurangan komoditas.



Gambar 1. Hambatan terkait COVID-19 dalam pemberian layanan imunisasi

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan pengendalian virus dan memperkuat kapasitas sistem pelayanan kesehatan untuk menangani pandemi. Segera dibukanya layanan kembali merupakan salah satu upaya untuk mencegah Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

1 Laporan cakupan imunisasi Kementerian Kesehatan, Juni 2020

2 Kementerian Kesehatan dan UNICEF: Rapid Assessment: Immunization Services in Indonesia, Mei 2020 [<https://www.unicef.org/indonesia/reports/rapid-assessment-immunization-services-indonesia>]

(PD3I). Kementerian Kesehatan mengembangkan dan mensosialisasikan serangkaian pedoman, standar operasi prosedur (SOP), dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Kementerian Kesehatan bersama mitranya terus melakukan advokasi di tingkat nasional dan daerah untuk memperkuat program imunisasi selama COVID-19 melalui: a) membuka kembali layanan imunisasi; b) mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program imunisasi, termasuk kegiatan-kegiatan untuk mengejar ketertinggalan selama situasi pandemi yang berkepanjangan; c) memastikan sumber daya manusia yang memadai; d) melengkapi petugas kesehatan dengan APD yang memadai sesuai protokol Kementerian Kesehatan; dan e) melakukan pendekatan mobilisasi sosial yang inovatif dan kontekstual untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat pada sistem kesehatan.

Sehubungan dengan upaya ini, sangat penting untuk memahami persepsi masyarakat tentang layanan imunisasi selama pandemi COVID-19 sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk Kementerian Kesehatan dan mitra dalam menerapkan pendekatan komunikasi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian utama.

Tujuan dan Metodologi

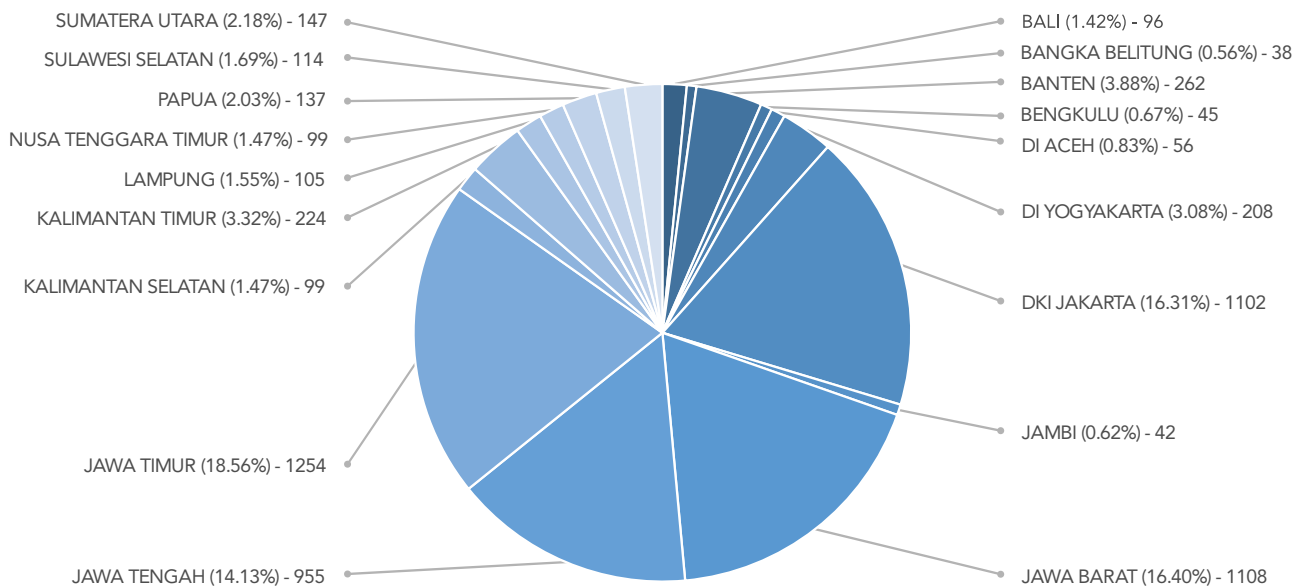
Untuk mengetahui pandangan orang tua dan pengasuh tentang imunisasi pada anak-anak dalam situasi pandemi COVID-19, pada 4-13 Juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan dukungan UNICEF, mengadakan survei daring yang ditujukan pada orang tua dan pengasuh anak di bawah dua tahun. Survei ini bertujuan untuk menerima masukan dari responden tentang penataan kembali pelayanan imunisasi dan upaya komunikasi yang diperlukan.

Berdasarkan permintaan Kementerian Kesehatan, Satgas COVID-19 Indonesia, [Gugus Tugas](#), mengirimkan SMS melalui semua penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia, dan tautan survei juga dibagikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Organisasi Profesi, Kantor Lapangan UNICEF serta didistribusikan melalui jaringan lain seperti asosiasi profesi. Informasi tersebut juga diposting di situs Gugus Tugas (<https://covid19.go.id>) selama sehari.

Temuan Studi Persepsi Masyarakat

► Sebaran Responden

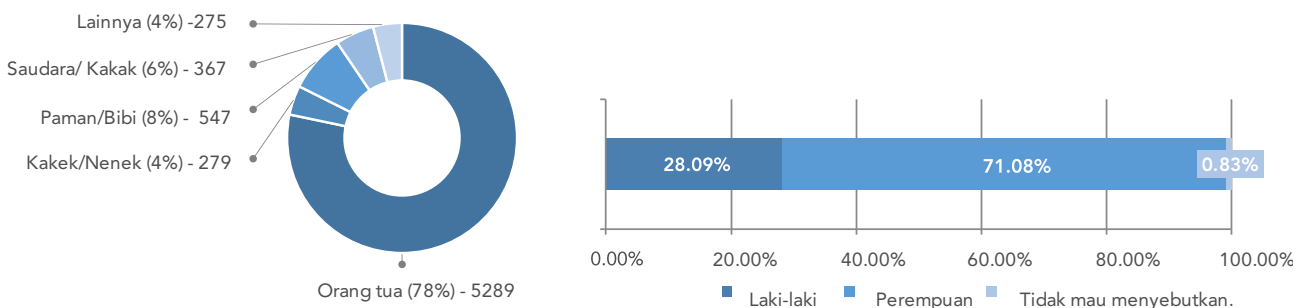
Sebanyak 12.641 orang tua dan pengasuh dari 34 provinsi ikut serta dalam survei ini; 7.558 responden memenuhi syarat (yaitu memiliki anak di bawah usia dua tahun), dengan tingkat penyelesaian 89%. Asal responden bervariasi menurut provinsi, dengan hampir dua pertiga responden berasal dari pulau Jawa, yang merupakan sekitar 60% dari total penduduk di Indonesia.



Gambar 2. Sebaran responden menurut provinsi

► Profil Responden

Lebih dari 78% responden adalah orang tua, diikuti dengan anggota keluarga yang memiliki anak seperti paman, bibi, saudara kandung, dan kakek nenek. Tiga perempat orang tua dan pengasuh yang mengikuti survei ini mengidentifikasi diri mereka berusia antara 20-40 tahun, dan 71% dari total responden adalah perempuan.



Gambar 3. Karakteristik responden

► Perilaku dan Praktik Mencari Layanan Imunisasi Selama Pandemi

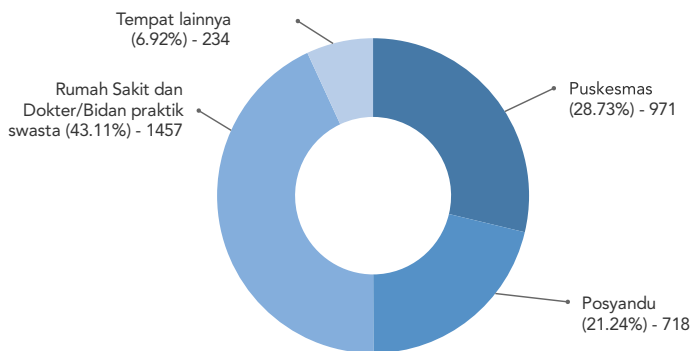
51% responden melaporkan bahwa mereka dalam satu-dua bulan terakhir mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan imunisasi selama pandemi COVID-19 untuk mengimunitasikan anaknya. Sedangkan hampir 50% responden lainnya tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan imunisasi karena kondisi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 atau karena anak-anak tidak membutuhkan vaksin untuk jangka waktu tertentu.

Perilaku dan praktik mencari layanan imunisasi berubah selama pandemi COVID-19

Sebelum COVID-19, di Indonesia, sekitar 90% anak diimunisasi di fasilitas umum: 75% di posyandu, 10% di puskesmas, 5% di polindes dan 10% anak-anak lainnya diimunisasi di klinik dan rumah sakit swasta.³ Akan tetapi, selama pandemi COVID-19 responden survei menunjukkan

bahwa klinik dan rumah sakit swasta menjadi sumber utama untuk mendapatkan layanan imunisasi untuk anak mereka (lebih dari 43%), puskesmas (29%) dan posyandu (21%).

Hal ini bisa terjadi karena tidak tersedianya layanan imunisasi, terutama di tingkat posyandu dan puskesmas. Secara bersamaan, hal ini mencerminkan tingginya permintaan imunisasi dimana orang tua dan pengasuh mencari fasilitas pelayanan kesehatan alternatif lainnya yang menawarkan layanan imunisasi yang dirasa aman. Akan tetapi, responden mengungkapkan kekhawatiran mereka atas kepatuhan vaksinator dalam menerapkan pedoman imunisasi yang aman di puskesmas.



Gambar 4. Sumber layanan imunisasi dalam pandemi

"Saya tidak membawa anak saya untuk diimunisasi dalam dua bulan terakhir karena anak saya sudah menyelesaikan imunisasi DPT3. Dan jadwal imunisasi berikutnya ketika dia berumur 9 bulan, yaitu bulan ini. Saya ingin mengimunitasikan anak saya meski sedang pandemi, tapi posyandu tutup selama pandemi." - Responden

Selama pandemi seperti ini, saya telah membawa anak saya untuk diimunisasi di klinik bidan yang lebih sepi dibandingkan di rumah sakit atau puskesmas." - Responden

Para orang tua melaporkan kekhawatiran mereka atas tutupnya layanan imunisasi, terutama di tingkat posyandu. Sebagian besar pengasuh dan orang tua menilai pelayanan imunisasi di posyandu maupun kunjungan rumah lebih aman dibandingkan pelayanan imunisasi di fasilitas kesehatan karena berbagai alasan. Responden menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan menawarkan layanan untuk anak-anak yang sakit dan sehat, dan tidak semua fasilitas dan staf mematuhi protokol kesehatan yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan, sehingga mereka tidak mau mengunjungi puskesmas karena takut tertular COVID-19. Oleh karena itu, ada permintaan yang tinggi dari masyarakat untuk melanjutkan layanan imunisasi di Posyandu. Seiring dengan hal tersebut, terdapat pula permintaan yang tinggi untuk kunjungan dari rumah ke rumah untuk skrining dan imunisasi.

3 Coe, Martha, Gergen, Jessica, Phily, Caroline, and Annette Ozaltin. August 2017. "Indonesia Country Brief". Sustainable Immunization Financing in Asia Pacific. Washington, DC: ThinkWell

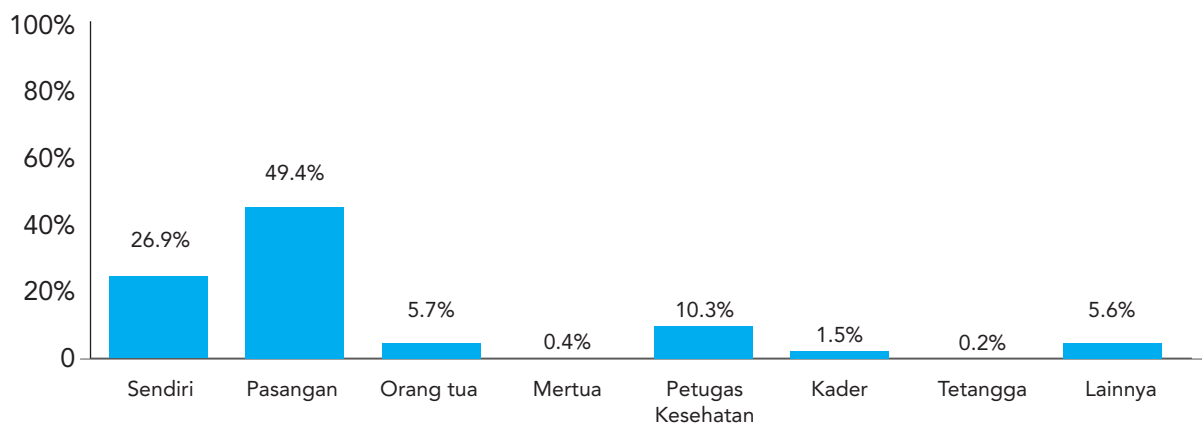
Beberapa responden melaporkan pengeluaran yang tinggi untuk mendapatkan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Layanan imunisasi pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah tidak dipungut biaya, sedangkan di klinik swasta tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika keluarga berstatus sosial ekonomi rendah maka mereka akan menahan diri untuk mengakses layanan imunisasi selama pandemi COVID-19 karena biayanya tidak terjangkau, hal ini akan menimbulkan ketidaksetaraan antara yang mampu dan tidak mampu.

"Saya bawa anak saya untuk imunisasi di posyandu karena mereka hanya menerima anak sehat untuk diimunisasi... sementara ini saya tidak percaya puskesmas dan rumah sakit karena pasti akan menjadi rujukan bagi orang sakit yang bisa saja mereka terjangkit COVID-19. Saya lebih memilih untuk membayar vaksin anak saya, daripada mengandalkan puskesmas yang gratis tetapi lingkungannya bisa jadi sumber penularan. " - Responden

"Saya masih mengunjungi klinik swasta karena jadwalnya lebih fleksibel, tetapi saya harus membayar biaya yang mahal. Fasilitas kesehatan masyarakat harus lebih fleksibel, sehingga mereka yang tidak mampu bisa dengan mudah melakukan imunisasi" - Responden

► Pengambilan Keputusan Untuk Mencari Layanan Imunisasi

Hampir setengah dari responden melaporkan bahwa keputusan untuk mendapatkan layanan imunisasi dipengaruhi oleh pasangan mereka dan lebih dari 25% memutuskan sendiri. Lebih lanjut, hampir 12% responden berkonsultasi dengan petugas dan kader kesehatan.

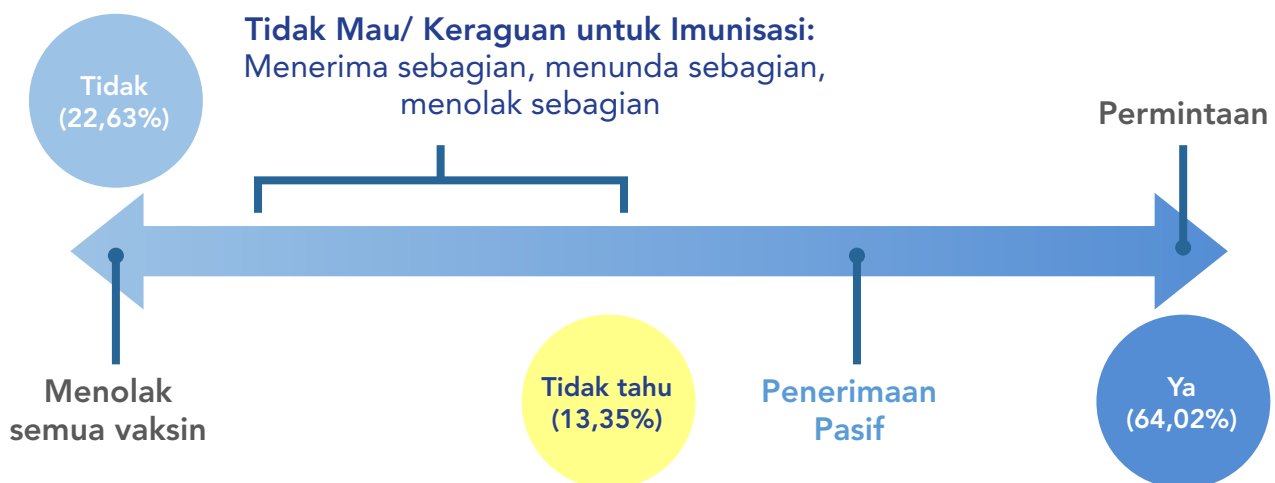


Gambar 5. Pengambil keputusan untuk mencari layanan imunisasi dalam pandemi

► **Permintaan Layanan Imunisasi**

Imunisasi anak merupakan norma sosial yang banyak dibahas di Indonesia. Namun, beberapa masalah terus ada seperti haram-halal vaksin, ketidakpercayaan dan ketakutan akan suntikan multipel telah mempengaruhi kepercayaan publik terhadap vaksin serta berbagai tantangan dalam menjangkau semua anak untuk diimunisasi dalam rangka mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Hal ini semakin dipersulit dengan adanya masyarakat yang tidak mau membawa anak mereka untuk mendapatkan imunisasi selama masa pandemi COVID-19 ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sekitar dua pertiga orang tua dan pengasuh berusaha untuk mengimmunisasikan anak mereka selama pandemi ini, yang dianggap sebagai 'penerimaan aktif.' Namun, 23% responden memutuskan untuk tidak membawa anak mereka untuk imunisasi, yang dianggap sebagai 'penolakan aktif.' Perlu dicatat bahwa lebih dari 13% orang tua dan pengasuh belum memutuskan dan dapat dikategorikan sebagai 'ragu-ragu.'

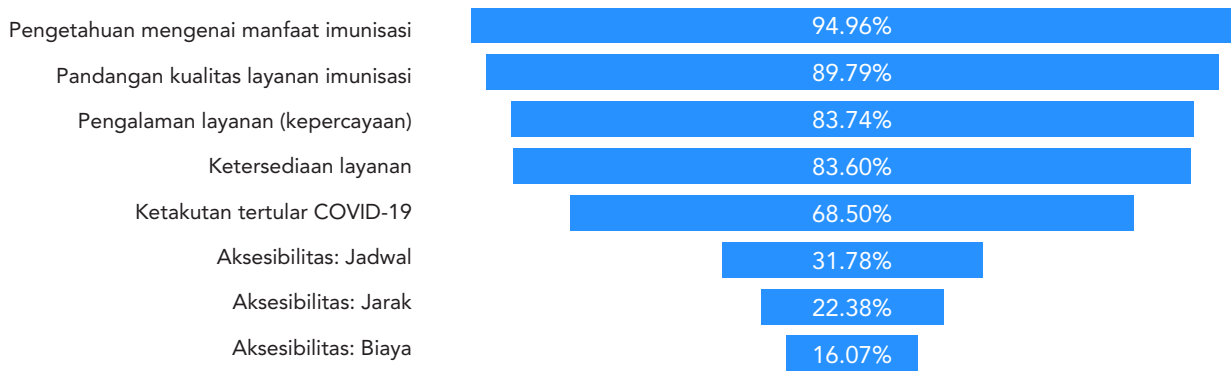
Temuan ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang ditujukan untuk berbagai kategori orang tua dan pengasuh.



Gambar 6. Kesiapan untuk membawa anak untuk imunisasi selama pandemi

► **Faktor yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan**

Berbagai faktor berkontribusi pada keputusan apakah orang tua dan pengasuh akan mencari layanan imunisasi selama pandemi COVID-19. Tingkat pemahaman tentang manfaat imunisasi adalah faktor yang paling berperan penting. Responden juga melaporkan bahwa persepsi kualitas layanan imunisasi sama pentingnya dengan ketersediaan layanan imunisasi. Orang tua dan pengasuh juga menyatakan bahwa risiko tertular COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Perlu dicatat bahwa 84% responden menganggap kepercayaan mereka pada vaksinator, terutama bidan, sangat penting. Aksesibilitas atau jarak lokasi fasilitas pelayanan kesehatan atau pos pelayanan imunisasi dan keuangan bukan merupakan suatu masalah dalam memutuskan untuk mendapatkan layanan imunisasi.

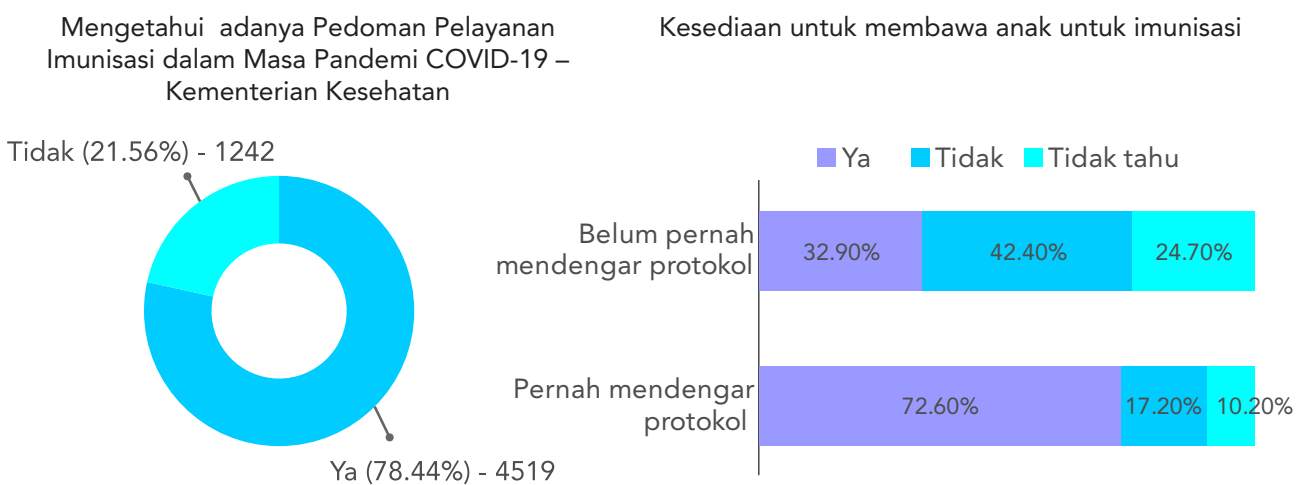


Gambar 7. Faktor kunci yang dipertimbangkan selama pengambilan keputusan

“Jika imunisasi dilakukan di puskesmas/posyandu akan menimbulkan keramaian dan pemberi vaksin tidak mengganti APD antarpasien, kami khawatir APD yang digunakan oleh pemberi vaksin dapat membawa virus dari pasien sebelumnya. Mohon lakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk melakukan imunisasi anak-anak dan rutin mengganti APD.” - Responden

► Kesadaran di antara Orang Tua dan Pengasuh tentang Protokol Kesehatan

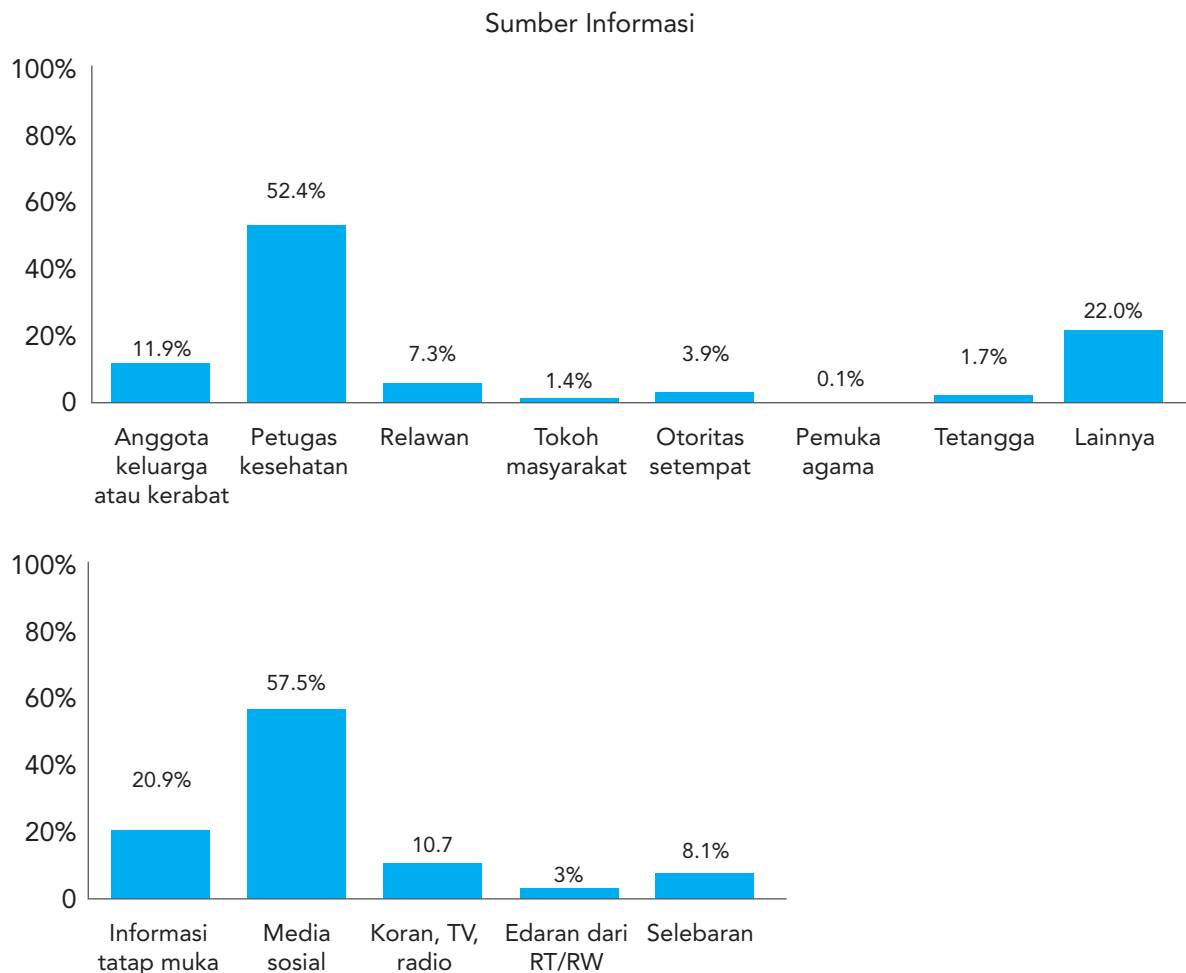
Kementerian Kesehatan telah mengembangkan dan mensosialisasikan serangkaian pedoman dan protokol kesehatan, seperti Pedoman Pelayanan Imunisasi pada Masa Pandemi COVID-19 untuk pemberian pelayanan imunisasi yang aman, praktik imunisasi yang aman, dan pelaksanaan SOP Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Puskesmas. Lebih dari 78% responden melaporkan mengetahui rekomendasi Kementerian Kesehatan untuk melanjutkan layanan imunisasi yang aman selama pandemi COVID-19. Survei tersebut menemukan bahwa orang tua dan pengasuh yang mengetahui pedoman imunisasi aman dan protokol kesehatan lebih bersedia membawa anak mereka untuk imunisasi.



Gambar 8. Kesadaran orang tua dan pengasuh serta pengaruhnya terhadap layanan imunisasi

► Referensi Sumber Informasi tentang Imunisasi

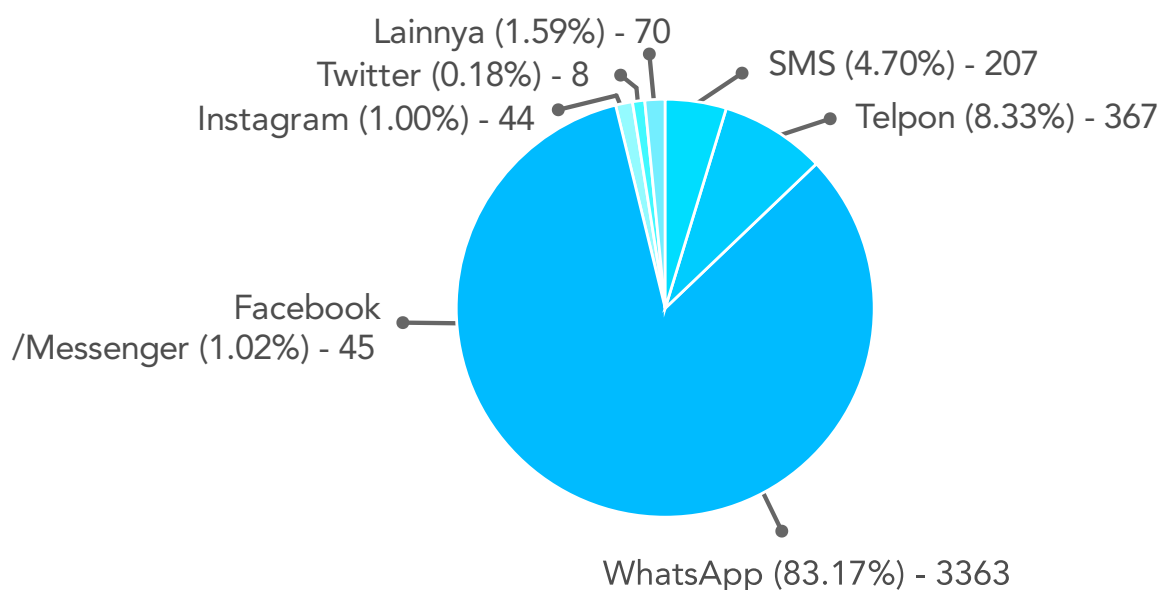
Sekitar 60% responden menyatakan bahwa petugas dan kader kesehatan menjadi sumber utama informasi tentang protokol kesehatan untuk layanan imunisasi yang aman yang telah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan. Media sosial adalah saluran paling umum (58%) untuk menyebarkan informasi semacam itu. WhatsApp (WA 42%), Instagram (IG 22%), dan Facebook/messenger (14%) sebagian besar digunakan untuk kegiatan pemberian informasi dan penjangkauan layanan imunisasi.



Gambar 9. Sumber informasi tentang protokol imunisasi yang aman

Dengan tidak adanya interaksi tatap muka dengan petugas dan kader kesehatan, lebih dari 83% responden menunjukkan preferensi untuk dihubungi melalui WA, diikuti dengan telepon (8%) dan SMS (5%).

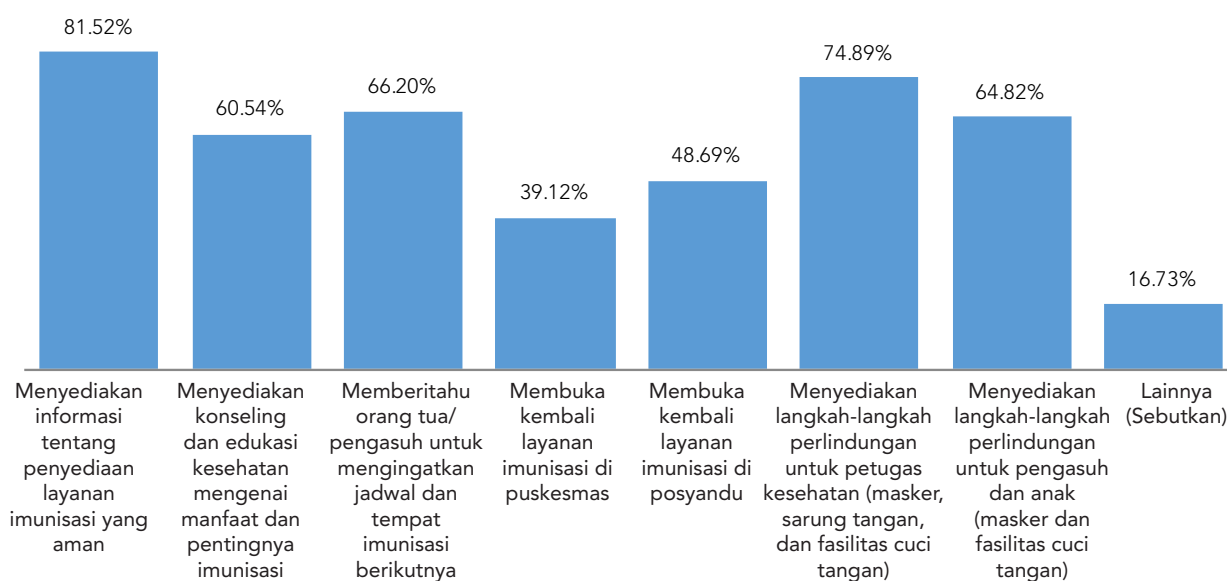
Preferensi saluran komunikasi selama pandemi



Gambar 10. Preferensi saluran komunikasi

► Harapan Orang tua dan Pengasuh

Orang tua dan pengasuh khawatir akan keamanan layanan imunisasi. Hampir 82% melaporkan perlunya menerima informasi yang akurat dari Pemerintah tentang penyediaan layanan imunisasi yang aman serta perlunya Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa petugas kesehatan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh pemerintah. Responden juga menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan pencegahan dan pengendalian infeksi yang memadai kepada orang tua dan pengasuh, seperti tersedianya fasilitas cuci tangan di lokasi layanan imunisasi. Dua pertiga dari responden mengharapkan adanya pengingat dari fasilitas pelayanan kesehatan tentang jadwal imunisasi berikutnya dan tempat pelayanan imunisasi.



Gambar 11. Rekomendasi utama dari orang tua dan pengasuh

“Yang menjadi perhatian saya tidak hanya tentang petugas kesehatan, tetapi juga orang tua lain dan apakah mereka mengikuti protokol kesehatan atau tidak. Melihat situasi di lapangan, hanya sedikit orang tua yang benar-benar serius menjaga jarak atau memakai masker.” - Responden

► Rekomendasi dari Orang tua dan Pengasuh

Responden mengusulkan rekomendasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian layanan imunisasi, yang dirangkum dalam Tabel 1 di bawah ini:

Penyelenggaraan Layanan	Pemberian Layanan	Logistik dan Sumber Daya	Komunikasi Sosial dan Komunikasi Perubahan Perilaku
Layanan imunisasi harus diselenggarakan di tempat yang aman: tempat yang luas, tanpa keramaian, dan jauh dari anak-anak atau pasien lain.	Imunisasi melalui kunjungan rumah lebih disukai	Stok vaksin yang habis, seperti vaksin polio (IPV), harus segera diatasi	Pengingat untuk orang tua tentang jadwal/tempat imunisasi berikutnya
Protokol kesehatan harus diterapkan: Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, dan penyediaan fasilitas cuci tangan. Petugas kesehatan harus mengganti sarung tangan untuk setiap anak.	Diperlukan sesi konseling paska imunisasi	Biaya imunisasi di klinik swasta harus mendapatkan penggantian biaya	Pemberian informasi tentang layanan imunisasi yang aman
Mempertahakan tindakan pencegahan infeksi di setiap langkah: hindari sistem registrasi berbasis kertas dan pena yang umum digunakan	Imunisasi di posyandu (bukan di pukesmas) lebih disukai; bidan dapat memberikan imunisasi dengan jadwal yang fleksibel	Biaya layanan imunisasi di klinik swasta harus ditanggung melalui JKN	Penggunaan media sosial (khususnya WA) dan pesan TV untuk menambah pengetahuan orang tua tentang imunisasi dalam masa pandemi COVID-19
Janji temu yang sudah dijadwalkan sebelumnya melalui berbagai cara (terutama melalui WA)	Makanan bergizi tambahan untuk anak-anak juga dapat diberikan	Penting bagi pemberi vaksin untuk bersikap ramah dan terampil	Keterlibatan kader aktif untuk memberitahu masyarakat

Tabel 1. Perhatian utama lainnya dari orang tua dan pengasuh

► **Strategi untuk Mengatasi Persepsi Masyarakat Mengenai Imunisasi**

Berdasarkan temuan survei, Kementerian Kesehatan, Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), World Health Organization (WHO) dan UNICEF telah mengidentifikasi strategi berikut untuk meningkatkan pemanfaatan layanan imunisasi selama pandemi COVID-19:

Strategi yang Diusulkan	Solusi yang Memungkinkan
<p>Dibukanya kembali layanan imunisasi sesuai dengan pedoman imunisasi dalam masa pandemi COVID-19 - Kementerian Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi lebih lanjut tentang berbagai SOP dan pedoman yang ada, termasuk imunisasi yang aman, pedoman puskesmas serta pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi. 2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sektor terkait lainnya untuk mendukung program imunisasi nasional melalui penerbitan surat edaran Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh Kepala Daerah 3. Menerbitkan surat edaran oleh Kementerian Kesehatan yang menegaskan kembali: <ol style="list-style-type: none"> a. pembukaan kembali pelayanan kesehatan dan imunisasi, khususnya di tingkat posyandu, b. menyesuaikan jadwal layanan imunisasi yang fleksibel, c. memastikan penanganan yang tepat bagi anak-anak dan pencatatannya, termasuk pengenalan rekaman digital, dan d. pentingnya pengingat dan instrumen untuk melacak anak – anak yang belum mendapatkan imunisasi (belum/tidak lengkap). 4. Mengembangkan SOP komprehensif tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. imunisasi melalui kegiatan puskesmas keliling beserta pos pelayanan imunisasi yang sudah ada, b. kegiatan-kegiatan untuk mengejar ketertinggalan/back-log fighting, dan c. kampanye imunisasi massal (multi-antigen) jika terdapat cakupan rendah (adanya penurunan cakupan imunisasi) (tergantung pada penilaian risiko dan pendapat ahli). <p>Catatan: <i>Imunisasi drive-through tidak disarankan karena praktik ini tidak memungkinkan petugas kesehatan untuk mengobservasi anak-anak setidaknya selama 30 menit setelah imunisasi.</i></p>

<p>Memastikan ketersediaan logistik yang memadai untuk tenaga kesehatan, dalam hal ini vaksinator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan APD untuk vaksinator: <ol style="list-style-type: none"> a. Pastikan APD yang memadai untuk vaksinator serta pelatihan penggunaan APD yang benar, b. Memasukkan rencana pengadaan APD ke dalam rencana logistik dan operasional untuk penanggulangan COVID-19. 2. Memastikan ketersediaan vaksin dan perlengkapan rantai dingin (<i>cold chain</i>).
<p>Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemberian layanan imunisasi yang aman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan mobilisasi sosial yang inovatif dan kontekstual, yang berfokus pada pesan-pesan imunisasi utama dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan materi KIE, iklan layanan masyarakat (ILM), materi pembelajaran lain yang menyoroti informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelanjutan layanan imunisasi, b. Layanan imunisasi yang aman sesuai dengan protokol kesehatan dan c. Jadwal imunisasi, manfaat dan pemberian imunisasi tepat waktu. 3. Menggunakan beragam media sosial (terutama WA) dan media lokal, serta platform lain seperti pengumuman di tempat ibadah setempat. 4. Menerapkan inisiatif pengembangan kapasitas yang inovatif dan jarak jauh untuk vaksinator dan kader dengan penekanan khusus pada keterampilan konseling dan komunikasi.
<p>Koordinasi dan kolaborasi antara sektor swasta dan publik</p>	<p>Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit/klinik swasta untuk memastikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. layanan imunisasi berkualitas tanpa biaya; b. sistem pelaporan dan pencatatan terintegrasi, dan c. ketersediaan vaksin dan logistik lainnya untuk menghindari hilangnya peluang.

► Ucapan Terima Kasih

Kementerian Kesehatan dan UNICEF mengucapkan terima kasih kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (<https://covid19.go.id>), penyedia layanan telekomunikasi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, semua fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, anggota ITAGI dan WHO. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dan pengasuh yang telah berpartisipasi secara aktif dan memberikan masukan yang berharga.



Rina Widyarningsih, tenaga kesehatan, melakukan kunjungan ke rumah Sudarmini (28) dan Putri, anak perempuannya (11 bulan) di Desa Sidorejo, Jawa Tengah, Indonesia.

© UNICEF/2020/Fauzan

